

## Strategi Sosialisasi Pemilu Berdasarkan Diferensiasi Sosiologis di Daerah dengan Tingkat Partisipasi Rendah

Election Socialization Strategy Based on Sociological Differentiation in Low-Participation Areas

✉ Ach. Apriyanto Romadhan

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

### ARTICLE INFO

Partisipasi Politik,  
Sosialisasi Pemilu,  
Pendidikan Politik,  
Kabupaten Malang

### Article History:

Received : 17 Nov 2025

Accepted : 25 Mei 2026

Publish : 29 Juni 2026

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model sosialisasi pemilu di daerah dengan tingkat partisipasi rendah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang pada Pilkada 2020. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah strategi sosialisasi berbasis diferensiasi dimensi sosiologis pemilih, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan sosialisasi, serta dokumen resmi KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh kecamatan di Kabupaten Malang yang secara konsisten memiliki tingkat partisipasi rendah sejak Pilkada 2010 dan 2015. Meskipun program pendidikan politik tahun 2020 dilakukan, distribusinya tidak merata karena lebih terfokus pada wilayah administratif strategis seperti Kepanjen, sementara kecamatan dengan partisipasi rendah seperti Kalipare dan Sumberpucung tidak mendapat intervensi. Dampaknya, partisipasi politik memang meningkat di hampir semua kecamatan pada Pilkada 2020, tetapi efektivitas pendidikan politik tidak linear dengan jumlah kegiatan yang dilakukan. Faktor lain, seperti kompetisi kandidat dan isu lokal, turut memengaruhi peningkatan partisipasi. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pendidikan politik harus lebih berbasis kebutuhan (*need-based policy*) agar mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik secara merata di seluruh wilayah.

### ABSTRACT:

This study aims to analyze strategies for developing civil servant competencies through the integration of socialization strategies in low-participation areas implemented by the Regional General Election Commission (KPUD) of Malang Regency during the 2020 local election. Employing a descriptive qualitative approach, the research examines socialization strategies based on the sociological differentiation of voters. Data were collected through in-depth interviews, observations of socialization activities, and official KPU documents. The findings reveal that ten subdistricts in Malang Regency have consistently recorded low levels of electoral participation since the 2010 and 2015 local elections. Although political education programs were conducted in 2020, their distribution was uneven, with greater concentration in strategically significant administrative areas such as Kepanjen, while low-participation subdistricts such as Kalipare and Sumberpucung received limited intervention. As a result, political participation increased in nearly all subdistricts during the 2020 local election, yet the effectiveness of political education did not correspond linearly to the number of activities carried out. Other factors, including candidate competition and local issues, also contributed to the rise in participation. This study underscores that political education strategies should be more need-based in order to enhance the quality of political participation more evenly across regions.

### How to Cite:

Romadhan, Ach. A. (2026). Strategi Sosialisasi Pemilu Berdasarkan Diferensiasi Sosiologis di Daerah dengan Tingkat Partisipasi Rendah. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 20(1), 79-94. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v20i1.911>.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang-Jawa Timur

Email : [achapriyantoromadhan@umm.ac.id](mailto:achapriyantoromadhan@umm.ac.id)

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a  
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 79-94

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi, karena melalui tingkat keterlibatan masyarakat dapat diukur sejauh mana sistem politik mampu mengakomodasi aspirasi warga negara (Mujani dkk., 2010; Rube'i dkk., 2023). Tingkat partisipasi pemilih tidak hanya mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik, tetapi juga berfungsi sebagai barometer legitimasi pemerintahan yang lahir melalui mekanisme elektoral (Mulyawan dkk., 2024). Rendahnya partisipasi politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), sering kali menimbulkan persoalan serius karena dapat mengurangi legitimasi pemerintahan daerah serta memperlemah ikatan antara masyarakat dengan institusi demokratis (Asgar, 2023). Dalam konteks ini, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjadi sangat krusial, terutama dalam merancang dan melaksanakan strategi sosialisasi yang efektif melalui pendekatan langsung maupun digital agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan (Hidayat, 2023; Proborini & Nurhidayati, 2022).

Kabupaten Malang, sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk besar di Jawa Timur, menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada dua periode pilkada sebelumnya tercatat jauh di bawah target nasional sebesar 77,5%. Pada tahun 2010, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 59,5% dan bahkan menurun menjadi 58,5% pada tahun 2015, menunjukkan tren penurunan partisipasi yang konsisten (KPU, 2024). Beberapa kecamatan di wilayah ini secara

konsisten mencatatkan partisipasi pemilih di bawah rata-rata (partisipasi rendah), baik pada pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural maupun kultural dalam dinamika partisipasi politik masyarakat (Dharmawan dkk., 2025; Pratama, 2024).

Fenomena rendahnya partisipasi politik ini dapat dijelaskan melalui sejumlah faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi politik yang kredibel, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap elite politik, hingga perbedaan karakteristik sosial dan budaya antarwilayah (Huntington, 1976; Norris, 2002). Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa rendahnya literasi politik dan menurunnya legitimasi institusi politik menjadi faktor signifikan yang memengaruhi perilaku pemilih dalam konteks demokrasi lokal (Dalton, 2017). Dengan demikian, rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Malang tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sebagai refleksi dari tantangan struktural dan kultural yang lebih mendalam.

Sejak era reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi demokratis yang ditandai oleh pelaksanaan pemilu yang lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif dibandingkan dengan periode sebelumnya (Aspinall, 2010). Reformasi sistem politik tersebut membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme representasi dan akuntabilitas politik, sehingga pemilu menjadi instrumen utama legitimasi kekuasaan di Indonesia (Mietzner, 2013). Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih tidak selalu menunjukkan tren positif, bahkan cenderung fluktuatif di beberapa daerah, yang mencerminkan adanya tantangan dalam mengonsolidasikan demokrasi elektoral (Ufen, 2006).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa apatisme politik masyarakat semakin menonjol, terutama pada level lokal di mana interaksi antara pemilih dan kandidat lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal dan patronase politik (Aspinall & Sukmajati, 2016) menemukan bahwa rendahnya partisipasi dalam pilkada tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penyelenggaraan seperti distribusi logistik atau jadwal pemungutan suara, tetapi juga terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kandidat maupun institusi penyelenggara pemilu. Hal ini sejalan dengan temuan internasional yang menunjukkan bahwa trust terhadap institusi demokrasi menjadi determinan utama perilaku memilih (Dalton, 2017).

Selain itu, faktor sosiologis juga memainkan peran penting dalam menentukan perilaku politik masyarakat Indonesia. Mujani dan Liddle menegaskan bahwa agama, etnisitas, dan status sosial-ekonomi berkontribusi besar dalam membentuk preferensi politik pemilih (Mujani & Liddle, 2010), sebuah temuan yang konsisten dengan studi komparatif politik di negara-negara berkembang (Norris & Inglehart, 2019). Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik di tingkat lokal tidak semata-mata dapat dipahami dari persoalan teknis pemilu, melainkan harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu interaksi antara faktor struktural, kultural, dan institusional dalam dinamika demokrasi Indonesia.

Di Kabupaten Malang, dengan keragaman demografis dan sosiologis yang tinggi, tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik semakin kompleks, sejalan dengan bukti bahwa variasi struktur sosial dan dinamika kelembagaan di Indonesia dan Asia Tenggara berkorelasi erat dengan perilaku politik warga (Bünte & Weiss, 2023; Dawe, 2023; Kristiyanto dkk., 2023). Sebagai wilayah yang memiliki perbedaan mencolok antara

kawasan perkotaan dan pedesaan, juga dengan variasi tingkat pendidikan, akses informasi, serta latar belakang pekerjaan masyarakat, mengaburkan batas kota–desa dan menghasilkan pola partisipasi yang tidak homogen strategi sosialisasi yang bersifat seragam berpotensi kurang efektif (Facal dkk., 2024; McKay dkk., 2023). Oleh karena itu, pendekatan berbasis diferensiasi sosiologis diperlukan dalam merancang model sosialisasi pemilu.

Secara umum, sosialisasi pemilu dipahami dalam kerangka modern sebagai upaya terintegrasi untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan motivasi kepada pemilih agar menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab pendekatan mutakhir menekankan pentingnya digitalisasi dan segmentasi audiens dalam mencapai efektivitas komunikasi politik (Afika dkk., 2024). Di Indonesia, KPU memiliki mandat formal untuk merancang dan mengimplementasikan program sosialisasi yang inklusif, mencakup seluruh segmen masyarakat melalui metode konvensional dan digital, dengan tujuan memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Namun, efektivitas program ini masih sering dipertanyakan, mengingat selama dua periode pemilihan bupati di Kabupaten Malang mengalami penurunan (KPU, Kabupaten Malang, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap model sosialisasi berbasis diferensiasi dimensi sosiologis pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang dalam Pilkada 2020. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas media tertentu dalam sosialisasi (misalnya media sosial, tatap muka, atau iklan politik), namun belum banyak yang secara eksplisit mengaitkan strategi sosialisasi dengan perbedaan karakteristik sosiologis pemilih pada level lokal.

Pendekatan ini penting karena keberagaman masyarakat Kabupaten Malang menuntut adanya strategi yang lebih kontekstual. Misalnya, pemilih di kawasan perkotaan cenderung lebih responsif terhadap informasi digital, sementara di pedesaan lebih mengandalkan interaksi langsung melalui tokoh masyarakat atau perangkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah literatur, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara pemilu di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pola atau model sosialisasi yang efektif berdasarkan dimensi sosiologis pemilih. Temuan tersebut meliputi identifikasi segmen pemilih di daerah partisipasi rendah berdasarkan faktor sosiologis seperti usia, pendidikan, pekerjaan, lokasi geografis, serta afiliasi komunitas, analisis efektivitas model sosialisasi yang digunakan KPU Kabupaten Malang, apakah melalui media massa, media sosial, tatap muka, atau kombinasi keduanya, evaluasi kontribusi model sosialisasi terhadap peningkatan partisipasi pemilih, khususnya dalam konteks Pilkada 2020 di daerah dengan partisipasi rendah serta rekomendasi kebijakan bagi KPU dalam merancang strategi sosialisasi pemilu yang lebih adaptif terhadap perbedaan karakteristik masyarakat. Dengan temuan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik mengenai partisipasi politik di Indonesia, tetapi juga memberikan sumbangan nyata bagi praktik penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Creswell & Creswell, 2017) Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami secara mendalam strategi sosialisasi pemilu

yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020. Penelitian kualitatif deskriptif dipandang relevan karena mampu menggambarkan realitas sosial dan dinamika partisipasi politik masyarakat secara alami, tanpa melakukan manipulasi variabel, serta memungkinkan peneliti untuk menangkap makna yang muncul dari pengalaman para informan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan pemilih dari berbagai latar belakang sosiologis, serta melalui observasi pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen resmi KPU, laporan partisipasi pemilih, produk sosialisasi baik cetak maupun digital, serta literatur yang relevan mengenai partisipasi politik dan sosialisasi pemilu.

Proses analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles dkk., 1996). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk mempermudah interpretasi, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola strategi sosialisasi serta efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pengecekan ulang hasil temuan kepada informan (*member check*). Ketiga komponen tersebut tidak berjalan secara linier, melainkan saling berhubungan secara interaktif. Saat peneliti melakukan reduksi data, misalnya, bisa jadi muncul kebutuhan untuk menambah data melalui wawancara tambahan. Begitu pula pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti bisa kembali ke reduksi data untuk menguji konsistensi temuan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian dengan menjamin kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara, serta menggunakan data semata-mata untuk kepentingan akademik. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana strategi sosialisasi berbasis diferensiasi sosiologis dijalankan oleh KPU Kabupaten Malang, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

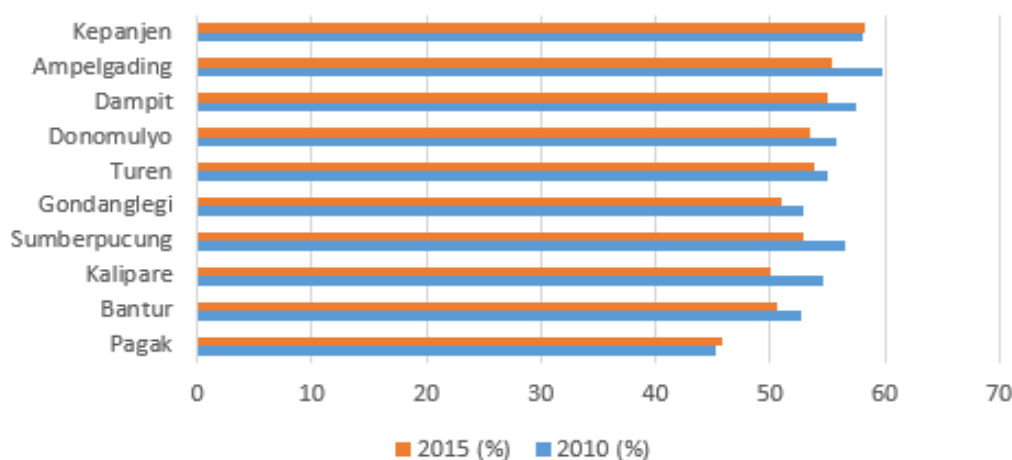
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta Daerah Partisipasi Rendah Kabupaten Malang

Berdasarkan data Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, dan 2015, diantara 35 kecamatan di Kabupaten Malang terdapat 10 kecamatan yang secara konsisten menempati posisi terendah dalam tingkat partisipasi politik. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Pagak, Bantur, Kalipare, Sumberpucung, Gondanglegi, Turen, Donomulyo, Dampit, Ampelgading, dan Kepanjen. Berdasarkan gambar 1, dari sisi rata-rata, Pagak menunjukkan angka partisipasi paling rendah, yakni hanya sekitar 45,54%, jauh di bawah rata-rata

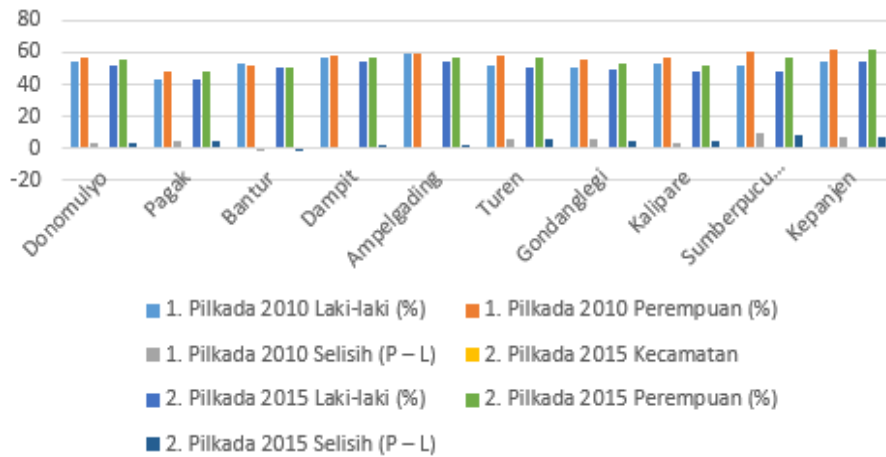
partisipasi kabupaten yang berada pada kisaran 60 persen. Kecamatan lain seperti Bantur, Kalipare, dan Sumberpucung juga cenderung stabil berada pada kisaran 51%-54% persen, menandakan adanya persoalan partisipasi yang bersifat struktural dan berulang di wilayah tersebut. Sementara itu, daerah seperti Dampit dan Ampelgading berada sedikit lebih tinggi, namun tetap masuk kategori rendah dengan angka sekitar 57 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih di beberapa wilayah bukanlah fenomena sesaat, melainkan kecenderungan yang relatif konsisten sepanjang dua periode pemilihan.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin pada Pilkada 2010, berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa partisipasi politik perempuan di hampir semua kecamatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya, di Kecamatan Sumberpucung selisih antara perempuan (60,9%) dan laki-laki (51,9%) mencapai 9%, yang merupakan gap tertinggi. Pola serupa juga tampak di Kepanjen dengan selisih 7,3%, dan Gondanglegi dengan 5,6%. Hanya di Kecamatan Bantur, laki-laki memiliki partisipasi sedikit lebih tinggi dibanding perempuan (53,2% berbanding 52%). Secara umum, ini menunjukkan bahwa



Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Gambar 1. Tingkat Partisipasi 10 Kecamatan Terendah (2010 dan 2015)



Sumber: Data Primer Diolah, 2026

**Gambar 2. Partisipasi Berdasarkan Jenis Kelamin di 10 Kecamatan dengan Partisipasi Terendah**

perempuan lebih aktif menggunakan hak pilihnya dibandingkan laki-laki pada Pilkada 2010.

Pada Pilkada 2015, pola yang sama cenderung berulang. Perempuan masih menunjukkan tingkat partisipasi lebih tinggi dibanding laki-laki di hampir seluruh kecamatan. Selisih terbesar tetap terjadi di Sumberpucung (8,3%) dan Kapanjen (7,7%). Hanya di Kecamatan Bantur perbedaan tidak signifikan (50,7% laki-laki dan 50,5% perempuan, selisih -0,2%). Beberapa kecamatan bahkan menunjukkan peningkatan kesenjangan, seperti Turen dari selisih 5,3% pada pilkada tahun 2010 menjadi 6% pada pilkada tahun 2015.

Dari kedua periode pilkada (2010 dan 2015), terdapat pola konsisten bahwa perempuan lebih banyak berpartisipasi dibanding laki-laki. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik di Kabupaten Malang tidak didominasi laki-laki, melainkan justru perempuan yang lebih aktif dalam menggunakan hak pilih. Hal ini sejalan dengan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Indonesia cenderung meningkat pascareformasi, terutama di wilayah pedesaan di mana keterikatan sosial dan komunitas lokal berperan besar dalam mendorong keterlibatan pemilih

(Kristiyanto dkk., 2023; Norris & Inglehart, 2019).

Perbedaan partisipasi antarjenis kelamin juga dapat dijelaskan melalui faktor sosio-kultural (Dalton, 2017). Perempuan di wilayah pedesaan sering kali lebih terikat dengan kegiatan komunitas dan organisasi sosial, sehingga lebih mudah terjangkau oleh jaringan sosialisasi KPU maupun tokoh masyarakat. Sementara itu, laki-laki, terutama yang bekerja di sektor informal atau mobilitas tinggi, lebih rentan tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan pekerjaan atau pragmatisme politik (hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Malang).

Temuan penting lain adalah adanya variasi selisih antar kecamatan. Kecamatan seperti Sumberpucung dan Kapanjen menunjukkan kesenjangan gender yang sangat tinggi, mengindikasikan bahwa faktor lokal, baik kultural maupun structural, berpengaruh besar terhadap partisipasi pemilih. Sebaliknya, di Bantur, partisipasi relatif seimbang, menunjukkan karakteristik sosial-politik yang berbeda. Ini menegaskan pentingnya pendekatan sosialisasi pemilu berbasis diferensiasi sosiologis yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan profil demografis dan sosial tiap kecamatan.

## **Strategi Sosialisasi Pemilu KPU di Daerah Partisipasi Rendah Kabupaten Malang**

Strategi yang dirumuskan KPU Kabupaten Malang dalam Renstra 2020–2024 menunjukkan arah kebijakan yang cukup komprehensif untuk menjawab persoalan partisipasi pemilih yang cenderung rendah dalam beberapa penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Visi besar lembaga ini adalah menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan mandiri sehingga dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan strategis, antara lain peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kompetensi dan integritas SDM, akurasi data pemilih, serta perluasan pendidikan politik masyarakat. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa rendahnya partisipasi dipandang tidak semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan terkait erat dengan dimensi kepercayaan publik, kapasitas penyelenggara, dan literasi politik pemilih.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Malang 2020-2024 menjadi kerangka utama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu di tingkat lokal berjalan sesuai prinsip demokrasi yang berintegritas. Renstra ini disusun berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Keputusan KPU RI Nomor 197 Tahun 2020 (KPU RI, 2020), sehingga sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui RPJMN.

Berdasarkan tabel 1, rencana strategis KPU Kabupaten Malang 2020–2024 diarahkan untuk memperkuat demokrasi elektoral melalui konsolidasi kelembagaan, pendidikan politik masyarakat, dan peningkatan kualitas komunikasi publik. Arah kebijakan ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang menempatkan “konsolidasi demokrasi” sebagai prioritas nasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Malang pada pemilu sebelumnya masih di bawah target nasional, sehingga strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan partisipatif menjadi sangat relevan (Mujani & Liddle, 2010; Norris & Inglehart, 2019). Pertama, dari sisi penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi, KPU berfokus pada regulasi politik dan transparansi partai politik untuk menjamin pemilu berjalan adil dan bebas dari keberpihakan. Hal ini penting mengingat rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara sering menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi politik. Studi internasional menunjukkan bahwa kelembagaan pemilu yang transparan dan kredibel berkontribusi signifikan terhadap peningkatan legitimasi pemilu (Norris & Grömping, 2019). Dengan memperkuat regulasi dan kelembagaan, KPU Kabupaten Malang berupaya membangun kembali kepercayaan publik pada proses demokrasi.

Kedua, penguatan kesetaraan dan kebebasan menjadi prioritas melalui pendidikan politik yang konsisten. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan politik. Strategi ini selaras dengan penelitian Inglehart dan Welzel yang menekankan pentingnya literasi politik inklusif untuk mengurangi kesenjangan partisipasi (Inglehart & Welzel, 2018). Dalam konteks Kabupaten Malang, kesenjangan partisipasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan mengindikasikan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas menjadi kebutuhan mendesak. Ketiga, peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi utama. Literasi digital masyarakat Kabupaten Malang masih bervariasi, sehingga penyediaan informasi kepemiluan

Tabel 1. Peta Strategi KPU Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Utama
Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	a. Penguatan peraturan perundangan politik	a. Menyusun regulasi kepemiluan yang adaptif dan progresif b. Meningkatkan integritas KPU dan penyelenggara pemilu di daerah
	c. Pemantapan demokrasi internal parpol	
	d. Transparansi & akuntabilitas parpol	
	e. Penguatan penyelenggara pemilu	
Penguatan kesetaraan & kebebasan	a. Pendidikan politik & pemilih konsisten	a. Menyelenggarakan pendidikan politik inklusif untuk semua lapisan masyarakat. b. Mendorong partisipasi publik melalui keterlibatan ormas dan komunitas
	c. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil	
	d. Penyelenggaraan pemilu yang baik	
Peningkatan kualitas komunikasi publik	a. Tata kelola informasi & komunikasi publik	a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sosialisasi pemilu. b. Transparansi informasi berbasis digital & keterbukaan data pemilu
	c. Peningkatan literasi TIK masyarakat	
	d. Penguatan peran SDM komunikasi, pers, penyiaran, jurnalis	
Pendidikan pemilih dan demokrasi	a. Pendidikan pemilih yang merata & berkelanjutan	a. Membangun program pendidikan politik berbasis komunitas dan segmen demografis
	b. Inovasi metode sosialisasi berbasis digital dan tatap muka	
Peningkatan kualitas pemilu	a. Penyelenggaraan pemilu lebih demokratis, jujur, adil, dan damai	a. Memperkuat koordinasi antar-lembaga b. Optimalisasi pengawasan partisipatif masyarakat
	c. Penyelesaian sengketa hukum yang baik	

Sumber: KPU (2021)

berbasis IT diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus menekan potensi misinformasi. Temuan ini sejalan dengan studi Vaccari dan Valeriani) yang menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan partisipasi politik jika dikelola secara transparan dan partisipatif (Vaccari & Valeriani, 2021). Oleh karena itu, strategi komunikasi publik KPU perlu diarahkan pada penguatan literasi digital masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap data pemilu yang terintegrasi.

Keempat, pendidikan pemilih ditempatkan sebagai instrumen utama peningkatan partisipasi politik. Tidak hanya menjelang pemilu, pendidikan pemilih perlu dijalankan sebagai program berkelanjutan untuk memperkuat literasi politik masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan Sloam dan Henn menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemilu (Sloam & Henn, 2019). Dalam konteks Malang,

tren penurunan partisipasi pada pilkada sebelumnya menunjukkan adanya keterputusan komunikasi politik antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, sehingga keberlanjutan program pendidikan politik menjadi kebutuhan strategis. Kelima, KPU Kabupaten Malang memprioritaskan kualitas pemilu dengan mengedepankan prinsip jujur, adil, damai, dan demokratis. Implementasi strategi ini melibatkan koordinasi antar-lembaga, penyelesaian sengketa hukum secara transparan, dan peningkatan peran pengawasan partisipatif masyarakat. Hal ini selaras dengan kajian Asgar yang menegaskan bahwa integritas pemilu yang tinggi tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu (Asgar, 2023).

Secara keseluruhan, Renstra KPU Kabupaten Malang 2020–2024 merefleksikan arah kebijakan yang adaptif terhadap tantangan demokrasi lokal. Fokus pada penguatan kelembagaan, pendidikan politik, komunikasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus memperkuat demokrasi elektoral di daerah. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, partai politik, maupun organisasi masyarakat sipil. Temuan dari analisis ini menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Malang bersifat holistik, menggabungkan dimensi kebijakan, kelembagaan, SDM, serta teknologi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan strategi yang adaptif sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Rendahnya partisipasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan seragam, melainkan perlu pendekatan yang lebih kontekstual. Misalnya, di daerah dengan partisipasi rendah karena faktor geografis, perlu strategi

sosialisasi berbasis komunitas; sementara di daerah dengan partisipasi rendah akibat apatisisme politik, pendekatan pendidikan politik dan peningkatan kepercayaan terhadap integritas penyelenggara menjadi lebih relevan. Dengan demikian, strategi yang disusun KPU Kabupaten Malang dapat dipahami sebagai langkah progresif untuk menjawab problem struktural dan kultural dalam partisipasi pemilih, sekaligus menjadi kerangka kerja untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal.

### **Pendidikan Peolitik di Daerah Partisipasi Rendah di Kabupaten Malang**

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi di tingkat lokal dan menjadi sasaran strategis keempat KPU Kabupaten Malang. Data yang ditampilkan pada tabel menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di sepuluh kecamatan Kabupaten Malang pada tahun 2010 dan 2015. Secara umum, terjadi kecenderungan penurunan partisipasi di hampir semua kecamatan, meskipun terdapat sedikit variasi di beberapa wilayah. Penurunan ini patut diperhatikan karena menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga keterlibatan masyarakat dalam proses politik elektoral.

Kecamatan Kalipare mencatat penurunan paling tajam, yaitu dari 54,55% pada 2010 menjadi 49,96% pada 2015. Hal serupa juga terjadi di Sumberpucung (56,53%-52,91%) dan Bantur (52,68%-50,71%). Berbeda dengan wilayah-wilayah tersebut, Kecamatan Pagak mengalami kenaikan meski sangat kecil, dari 45,34% menjadi 45,75%. Sementara itu, Kecamatan Kepanjen justru memperlihatkan stabilitas dengan sedikit peningkatan dari 58,05% menjadi 58,22%. Stabilitas di Kepanjen dapat dijelaskan oleh posisinya sebagai pusat pemerintahan kabupaten, yang cenderung lebih intensif mendapatkan akses informasi, pelayanan publik, serta kegiatan politik

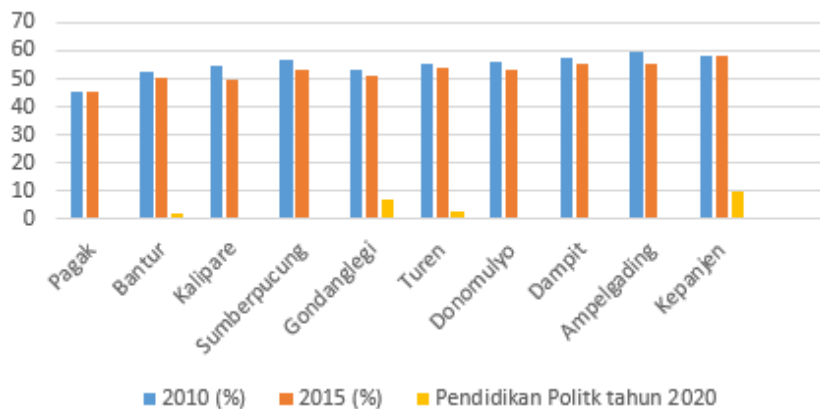
yang lebih terbuka dibandingkan wilayah lain. Dengan demikian, aksesibilitas dan status administratif tampaknya memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik.

Pendidikan politik penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, tata cara pemungutan suara dan meminimalisir berita hoax (hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Malang). Namun demikian berdasarkan gambar 3, pelaksanaan pendidikan politik pada tahun 2020, terlihat adanya ketimpangan distribusi kegiatan antar kecamatan. Kepanjen memperoleh alokasi terbesar dengan 10 kegiatan, Gondanglegi mendapatkan 7 kegiatan, sedangkan Turen memperoleh 3 kegiatan. Di sisi lain, kecamatan yang partisipasinya rendah atau menurun tajam seperti Kalipare, Sumberpucung, dan Dampit justru tidak mendapat alokasi kegiatan pendidikan politik. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa strategi distribusi program pendidikan politik belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa penentuan lokasi pendidikan politik lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan administratif dan strategis dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Kepanjen sebagai ibu kota kabupaten,

misalnya, sering dipilih sebagai lokasi kegiatan karena faktor ketersediaan sarana, aksesibilitas, dan konsentrasi massa (hasil wawancara dengan masyarakat). Namun, dari perspektif demokrasi partisipatoris, pendekatan semacam ini berpotensi memperlebar kesenjangan partisipasi antarwilayah, karena daerah dengan partisipasi rendah dibiarkan tertinggal tanpa intervensi yang signifikan. Secara substantif, pola distribusi kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Malang menunjukkan belum adanya *need-based policy* yang memastikan kecamatan dengan tingkat partisipasi rendah menjadi prioritas utama. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap pemerataan kualitas demokrasi lokal.

Pendidikan politik di Kabupaten Malang belum berjalan efektif sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Alih-alih diarahkan pada kecamatan yang mengalami penurunan signifikan, kegiatan lebih banyak tersentralisasi di wilayah yang sudah relatif stabil. Akibatnya, dampak kegiatan pendidikan politik menjadi kurang terasa dalam meningkatkan partisipasi secara merata di seluruh wilayah. Dalam jangka panjang, pola semacam ini dapat menimbulkan disparitas partisipasi politik antar kecamatan, yang bisa berimplikasi pada legitimasi pemerintahan daerah.



Sumber: Data Diolah

**Gambar 3. Pendidikan Politik di Daerah Partisipasi Rendah Tahun 2020**

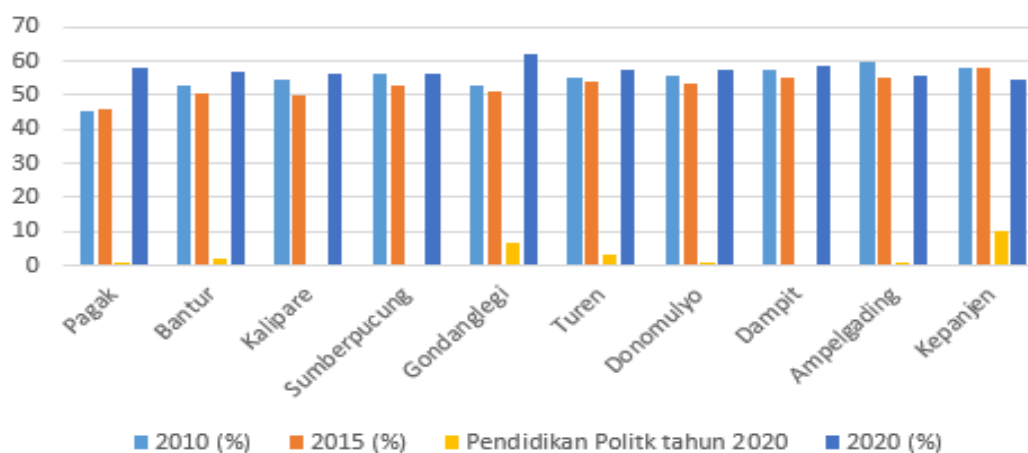
Oleh karena itu, strategi pendidikan politik di Kabupaten Malang perlu diarahkan ulang agar lebih berbasis kebutuhan. Kecamatan dengan tren penurunan tajam seperti Kalipare, Sumberpucung, dan Dampit perlu mendapatkan prioritas dalam program-program sosialisasi politik. Dengan begitu, pendidikan politik dapat lebih efektif mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, partisipasi yang merata di seluruh kecamatan akan menjadi landasan penting bagi terciptanya demokrasi lokal yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

### Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Politik Pilkada 2020 Kabupaten Malang

Pada tahun 2020, menjelang Pilkada Kabupaten Malang, dilaksanakan program pendidikan politik yang didistribusikan tidak merata. Kecamatan Kapanjen memperoleh porsi tertinggi dengan 10 kegiatan, Gondanglegi 7 kegiatan, Turen 3 kegiatan, sementara beberapa kecamatan seperti Kalipare dan Sumberpucung tidak mendapat alokasi kegiatan sama sekali. Distribusi ini lebih menekankan pada wilayah strategis dan administratif dibandingkan kebutuhan empiris partisipasi.

Hasil Pilkada 2020 menunjukkan peningkatan partisipasi di hampir semua kecamatan dibandingkan tahun 2015. Misalnya, berdasarkan gambar 4, Kecamatan Pagak meningkat dari 45,75% (2015) menjadi 58,29% (2020), Gondanglegi dari 50,95% menjadi 62,29%, dan Dampit dari 55,08% ke 58,48%. Bahkan kecamatan yang tidak mendapat pendidikan politik formal seperti Kalipare dan Sumberpucung tetap mengalami kenaikan menjadi 56,45% dan 56,32%. Jika dianalisis, kecamatan dengan alokasi pendidikan politik tinggi memang menunjukkan capaian partisipasi relatif lebih baik. Gondanglegi yang mendapat 7 kegiatan mencapai 62,29%, tertinggi di antara semua kecamatan. Namun, Kapanjen yang memperoleh alokasi terbesar (10 kegiatan) justru mengalami penurunan tipis dari 58,22% (2015) ke 54,83% (2020). Hal ini menandakan bahwa efektivitas pendidikan politik tidak selalu linear dengan jumlah kegiatan, melainkan bergantung pada kualitas, relevansi isu, serta penerimaan masyarakat terhadap materi pendidikan politik.

Menariknya, kecamatan yang tidak mendapatkan pendidikan politik pun mengalami kenaikan partisipasi, seperti Sumberpucung (52,91%-56,32%) dan Kalipare (49,96%-56,45%). Fenomena ini



Sumber: Data Diolah

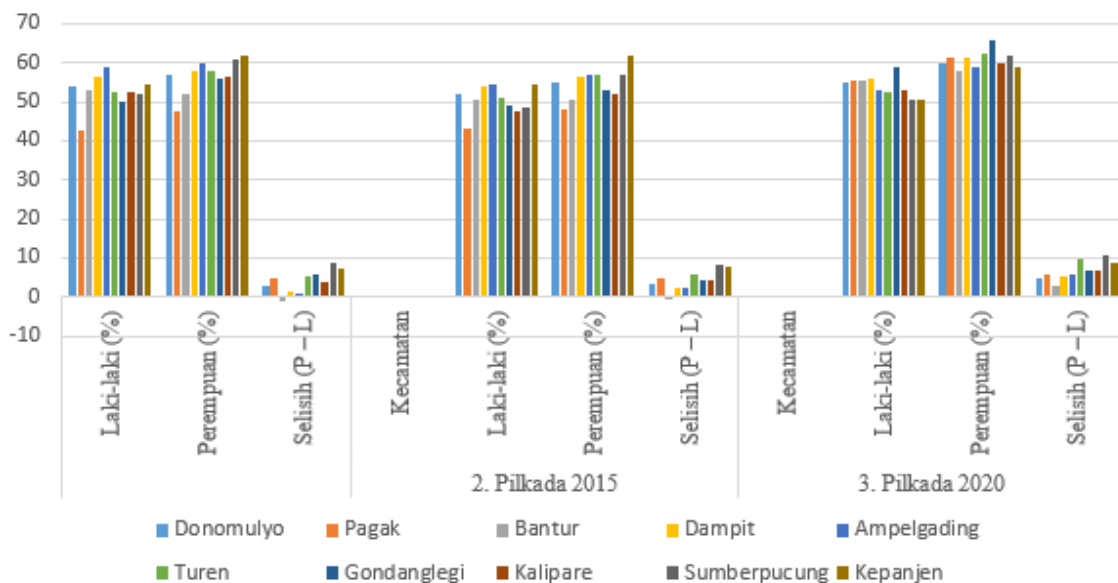
**Gambar 4. Dampak Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik pada Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Malang**

mengindikasikan bahwa faktor kompetisi politik antar kandidat dan isu lokal yang mengakar bisa lebih kuat pengaruhnya dibandingkan intervensi pendidikan politik formal. Dengan kata lain, pendidikan politik formal hanya salah satu instrumen, sementara dinamika sosial politik di lapangan lebih menentukan partisipasi nyata. Secara umum, Pilkada 2020 di Kabupaten Malang menunjukkan perbaikan partisipasi dibanding periode sebelumnya. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai dampak kumulatif dari meningkatnya kesadaran politik masyarakat, baik melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun melalui interaksi langsung dengan kandidat, partai politik, dan media lokal. Namun, disparitas antar kecamatan tetap terlihat, terutama karena ketidakmerataan distribusi program pendidikan politik.

Sementara itu berdasarkan jenis kelamin pada Pilkada 2020, terjadi peningkatan partisipasi pada kedua gender. Berdasarkan gambar 5, pemilih laki-laki mencapai kisaran 55–60%, sementara perempuan berada di angka 57–63%. Peningkatan ini tidak bisa dilepaskan dari intervensi pendidikan

politik oleh KPU Kabupaten Malang, meskipun distribusinya tidak merata antar kecamatan. Menariknya, meskipun beberapa kecamatan seperti Kalipare dan Sumberpucung tidak mendapat pendidikan politik formal, partisipasi tetap meningkat. Hal ini menguatkan temuan Aspinall dan Sukmajati bahwa dalam konteks lokal, faktor kandidat, isu spesifik, dan jaringan sosial sering kali lebih menentukan perilaku memilih dibandingkan dengan sosialisasi formal (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Keunggulan perempuan dalam partisipasi politik di Kabupaten Malang juga dapat dijelaskan melalui faktor psikologis dan kultural. Studi Mulyawan menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melihat partisipasi politik sebagai kewajiban moral dalam menjaga legitimasi pemerintahan, sementara laki-laki lebih dipengaruhi oleh rasionalitas politik terkait kepentingan ekonomi maupun kedekatan dengan kandidat (Mulyawan dkk., 2024). Meskipun demikian, adanya selisih antara laki-laki dan perempuan menandakan bahwa program sosialisasi KPU belum sepenuhnya berbasis gender. Selama ini,



Sumber: Data Diolah

**Gambar 5. Partisipasi Berdasarkan Jenis Kelamin di 10 Kecamatan dengan Partisipasi Terendah**

pendidikan politik lebih bersifat umum dan kurang mempertimbangkan kebutuhan serta perbedaan segmentasi audiens. Jika strategi sosialisasi mampu lebih terarah, misalnya dengan memanfaatkan organisasi perempuan, komunitas pekerja laki-laki, serta media digital yang lebih dekat dengan generasi muda, maka partisipasi politik bisa ditingkatkan lebih merata. Afika menegaskan bahwa digitalisasi sosialisasi politik dengan segmentasi audiens mampu meningkatkan efektivitas pendidikan politik secara signifikan (Afika dkk., 2024).

Dengan demikian, data partisipasi politik berbasis gender di Kabupaten Malang memberikan dua temuan penting. Pertama, perempuan konsisten menunjukkan tingkat partisipasi lebih tinggi, yang menunjukkan adanya potensi basis elektoral yang kuat dari kelompok ini. Kedua, peningkatan partisipasi pada Pilkada 2020 mengindikasikan adanya dampak positif dari pendidikan politik, meskipun faktor eksternal seperti figur kandidat dan isu lokal tetap dominan. Oleh karena itu, strategi pendidikan politik yang berbasis diferensiasi gender menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan partisipasi rendah, sekaligus memperkuat demokrasi elektoral yang lebih inklusif.

Ketimpangan distribusi kegiatan pendidikan politik berpotensi menimbulkan kesenjangan jangka panjang dalam partisipasi politik. Kecamatan dengan intervensi rendah atau nihil akan tetap mengandalkan faktor eksternal seperti popularitas kandidat, sehingga partisipasi masyarakat tidak berangkat dari kesadaran politik yang kuat. Hal ini menimbulkan risiko partisipasi semu (instrumental) ketimbang partisipasi substantif (berdasarkan pemahaman politik yang matang). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik sebelum Pilkada 2020 memang memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi, terutama di Gondanglegi dan

Turen. Namun, dampak tersebut tidak merata karena kualitas pelaksanaan, relevansi materi, serta ketepatan sasaran lebih menentukan dibandingkan kuantitas kegiatan. Partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 lebih banyak dipengaruhi oleh kombinasi antara pendidikan politik, faktor kandidat, dan isu lokal. Oleh karena itu, untuk Pilkada mendatang, strategi pendidikan politik sebaiknya lebih berbasis kebutuhan (*need-based*) dan diarahkan pada kecamatan dengan tren partisipasi rendah agar dampaknya lebih signifikan terhadap penguatan demokrasi lokal.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya partisipasi politik di Kabupaten Malang merupakan persoalan struktural dan kultural yang konsisten terjadi di sejumlah kecamatan. Meskipun program pendidikan politik KPU Kabupaten Malang pada Pilkada 2020 berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi, distribusi yang tidak merata menunjukkan kelemahan dalam perencanaan strategi sosialisasi. Kecamatan dengan tingkat partisipasi rendah justru tidak mendapatkan alokasi pendidikan politik yang memadai, sehingga dampaknya kurang signifikan. Selain itu, hasil Pilkada 2020 memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan pendidikan politik, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kompetisi kandidat, isu lokal, serta perbedaan demografis dan kultural. Dengan demikian, efektivitas pendidikan politik tidak dapat diukur hanya dari kuantitas kegiatan, melainkan dari kualitas, relevansi isu, dan kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan strategi pendidikan politik berbasis kebutuhan, sehingga intervensi diarahkan pada wilayah dengan partisipasi rendah untuk memperkuat demokrasi lokal secara lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam

konteks ini, penelitian merekomendasikan agar KPU Kabupaten Malang menerapkan strategi pendidikan politik berbasis kebutuhan (*need-based policy*), yakni mengarahkan program secara khusus pada wilayah yang secara historis menunjukkan partisipasi rendah. Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting, baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil, agar sosialisasi pemilu lebih kontekstual dan menyentuh basis sosial yang beragam. Pendidikan politik juga perlu mengombinasikan metode tatap muka dengan pendekatan digital, terutama untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat perkotaan yang lebih responsif terhadap media daring. Bagi penelitian akademik selanjutnya, isu partisipasi politik di tingkat lokal masih menyimpan ruang kajian yang luas. Penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial, trust terhadap elite politik, serta peran agama dan identitas sosial-ekonomi dalam membentuk perilaku memilih dapat memperkaya pemahaman teoretis maupun praktis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi literatur ilmiah, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis bagi penyelenggara pemilu di daerah lain dengan karakteristik serupa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afika, S. N., Darajah, A., Arrohmah, L. L., Anggraini, J. P., & Rahmanto, S. (2024). Efektivitas Sosialisasi dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 7(3), 1041–1053.
- Arrianie, L., Lestari, P., & Ningrum, D. P. (2024). Political and Intercultural Communication in Determining Presidential Candidates in the Indonesian Elections 2024. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 40(3), 152–167. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2024-4003-09>.
- Asgar, S. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.
- Aspinall, E. (2010). Indonesia: the Irony of Success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20–34.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Bünthe, M., & Weiss, M. L. (2023). Civil Society and Democratic Decline in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(3), 297–307.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Dalton, R. J. (2017). *The participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.

- Dawe, G. (2023). *Politic Words: Writing Women Writing History*. Peter Lang.
- Dharmawan, R. A., Setyawan, K. G., Stiawan, A., & Imron, A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya). *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5(1), 52–68.
- Facal, G., Lafaye de Micheaux, E., & Norén-Nilsson, A. (2024). Introduction—Political Norms in Southeast Asia: Overlapping Registers and Shifting Practices. In *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia* (pp. 3–15). Springer.
- Hidayat, B. (2023). Analisis Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kota Solok. *Skripsi*. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Huntington, S. P. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2018). *Political culture and democracy* (pp. 141–164). Taylor and Francis.
- KPU, Kabupaten Malang. (2024). *Data Perbandingan Partisipasi Masyarakat pada Pibup Kabupaten Malang, Tahun 2010, 2015 dan 2020*. KPU, Kabupaten Malang.
- KPU, Kabupaten Malang. (2021). *Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Tahun 2022*. KPU, Kabupaten Malang.
- KPU Kab Malang. (2020). *Laporan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020* (Issue 119). <https://kpud-malangkab.go.id/berita/nomor-urut-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-malang-tahun-2020/340/>.
- KPU Ko. (2021). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 127 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy. *Heliyon*, 9(12), 1-14.
- McKay, L., Jennings, W., & Stoker, G. (2023). What is the Geography of trust? The Urban-Rural Trust Gap in Global Perspective. *Political Geography*, 102, 102863.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology*. Flipside Digital Content Company Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. Analisis Data. *Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah*, 61.

- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). Indonesia: Personalities, Parties, and Voters. *Journal of Democracy*, 21(2), 35–49.
- Mulyawan, W., Rifai, R., & Hidayat, R. (2024). Factors influencing First-Time Voters' Turnout in the 2024 Legislative Elections: Political Efficacy, Campaign Strategies, and Financial Incentives. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 12(2), 157–168.
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.
- Norris, P., & Grömping, M. (2019). *Electoral Integrity Worldwide*. Department of Government and International Relations Social Sciences Building University of Sydney.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Pratama, P. (2024). *Sulitnya Caleg Perempuan Menembus Gedung Senayan*. katadata.co.id. <https://katadata.co.id/analisisdata/663b499604280/sulitnya-caleg-perempuan-menembus-gedung-senayan/>.
- Proborini, A., & Nurhidayati, N. (2022). Komunikasi dan Peranan KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020. *Reformasi*, 12(1), 67–78.
- Rube'i, M. A., Azwar, I., & Firmansyah, S. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik Untuk Pemilih Pemula di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 115–126.
- Putri, R. C., Pamungkas, A., Tamado M, A. E., Saputra, B. A., & Athallah, M. F. (2025). *Pengaruh Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia*. [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-37175-5\\_1103.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-37175-5_1103.pdf).
- Sloam, J., & Henn, M. (2019). *Youthquake 2017: The Rise of Young Cosmopolitans in Britain*. Springer Nature.
- Ufen, A. (2006). *Political parties in post-Suharto Indonesia: Between political aliran and 'Philippinisation'*. GIGA Working Papers.
- Vaccari, C., & Valeriani, A. (2021). *Outside the Bubble: Social Media and Political Participation in Western Democracies*. Oxford University Press.